

## **PENGARUH PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN EMAS KOLONIAL BELANDA DI LEBONG TAHUN 1897-1930**

### **Abstract**

Lebong was a region that included in the Regency of Bengkulu. In 1897 to 1930, Lebong be one of the areas in the Netherlands East Indies the productive yield minerals in the form of gold. There are three privately-owned gold mining company Netherlands and two gold mining company owned by the Government of Netherlands East Indies. This research was carried out with the use of historical methods of heuristics, critique of sources, interpretations and historiography. The results obtained from the study shows that there is a significant change for the Lebong, both from the governmental system, city planning, as well as the composition of the society. These changes occurred after the establishment of the colonial Netherlands Gold Mining Corporation. The local government system is limited and got control of regulations enacted by the Government of Netherlands East Indies. In addition, the presence of a gold mining company Colonial Netherlands made of roads, thus facilitating mobility in the Lebong. Netherlands Indies Government built facilities such as offices, factories, residences, places of entertainment, and means of education to support sustainability of gold mining companies. On the other hand, the existence of the colonization program drawn from Java to the region to meet the needs of kuli of contracts for mining companies make Lebong bustling city as population and economic activity will be.

**Keywords : significant, mobility, colonization**

**Siti Rahmana**

*E-mail: siti\_rahmana\_2009@yahoo.com*

*STIESNU Bengkulu*

### **PENDAHULUAN**

Pertambangan yang bersifat tradisional di wilayah Nusantara telah lebih dulu dilakukan oleh masyarakat pribumi sebelum bangsa Eropa datang dan mengambil alih kegiatan penambangan dengan menggunakan teknik yang lebih modern. Kegiatan penambangan bahan galian yang bersifat tradisional saat itu dapat ditemukan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Secara teknis, proses

penambangan terbilang sederhana karena hanya berupa mendulang emas di sungai, termasuk menambang di gua-gua dengan peralatan seadanya. Masyarakat pribumi melakukan penambangan dengan seizin penguasa setempat.

Penambangan emas primer maupun sekunder yang dilakukan oleh penduduk setempat di Pulau Sumatera tersebar mulai dari Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat,

Jambi, Palembang, hingga Bengkulu.<sup>1</sup> Hasil pertambangan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Eropa ketika datang ke Nusantara. Pada tahun 1602, Pemerintah Hindia Belanda membentuk persekutuan dagang Hindia Timur atau *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang mempunyai hak monopoli dagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan, termasuk di Indonesia.<sup>2</sup> Selain mencari rempah-rempah, VOC sudah mulai melakukan pembelian logam emas dari penduduk setempat sejak tahun 1619.<sup>3</sup>

Upaya monopoli VOC terhadap barang tambang dilanjutkan pada tahun 1652, yaitu melakukan penelitian dengan para ilmuwan dari Eropa mengenai berbagai aspek ilmu alam seperti jenis barang tambang yang ada di wilayah Nusantara.<sup>4</sup> Penambangan emas oleh VOC mulai dilakukan tahun 1669 di Salido Sumatera Barat, yang sampai tahun 1735 dapat menghasilkan bijih sebanyak 800 ton.<sup>5</sup> Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan oleh VOC dilanjutkan

dengan membuka pertambangan emas di Kalimantan Barat.<sup>6</sup>

Pada tahun 1799 Pemerintah Belanda membubarkan VOC dan mengambil alih segala urusan di wilayah Nusantara, termasuk urusan pertambangan. Penyelidikan geologi dan pencarian bahan galian tambang selanjutnya dilakukan dengan lebih terarah.<sup>7</sup> Upaya untuk mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan terus dilakukan, maka tahun 1850 Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Dienst van het Mijnwezen* atau Dinas Pertambangan yang berkedudukan di Batavia. Berdasarkan Peraturan *Indische Wetgeving* terutama Peraturan Pertambangan (*Mijnordonnantie*) menyatakan bahwa Dinas Pertambangan dikepalai oleh seorang kepala yang disebut *Chef van het Mijnwezen*.<sup>8</sup> Baru pada tahun 1899, dikeluarkanlah sebuah undang-

<sup>1</sup> Djoko Darmono (ed.), *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa : Sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia*, (Jakarta : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009), hlm. 78.

<sup>2</sup> Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip., *Inventaris Arsip Dienst van Mijnwezen 1899-1959*, (Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011), hlm. 1.

<sup>3</sup> Djoko Darmono., *loc., cit.*

<sup>4</sup> Inventaris Arsip Dienst van Mijnwezen 1899-1959., *op., cit.*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Djoko Darmono., *loc., cit.*

<sup>6</sup> Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip., *Guide Arsip Kekayaan Negara Bidang Pertambangan Masa Hindia Belanda*, (Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011), hlm. 7.

<sup>7</sup> Djoko Darmono., *op., cit.*, hlm. 61.

<sup>8</sup> Dinas Pertambangan disebut sebagai bagian dari suatu departemen yang dinamakan *afdeeling*. Institusi ini merupakan salah satu bagian di bawah suatu Departemen besar. Formasi personil dalam Dinas ini diatur berdasarkan kebutuhan anggaran tahunan, oleh karena itu berdampak pula pada adanya reorganisasi personil dan ruang lingkup kerja yang mulai diatur dalam Peraturan Pemerintah (*Gouvernement Besluit*) tanggal 31 Desember 1873 No.33 hingga Kolonial *Verslag* tahun 1915. Inventaris Arsip Dienst van Mijnwezen 1899-1959., *op., cit.*, hlm. 2-3. Lihat, *Indonesisch Staatsblad* no. 280 tahun 1873 tentang Peraturan Pemerintah terkait Dinas Pertambangan.

undang pertambangan yang dipakai sebagai dasar hukum yang diberi nama *Indische Mijnwet*.<sup>9</sup>

Perubahan dalam Dinas Pertambangan mengakibatkan kegiatan pertambangan dapat dikelola dengan lebih baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun pihak swasta. Terbukti dengan didirikannya tiga perusahaan pertambangan Kolonial Belanda, antara lain *Ombilinmijnen* di *Sumatera West Kust* (Sumatera di perairan daerah Barat), Bukit Asam di Palembang, dan Pulu *Lautmijnen* di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Terdapat sepuluh wilayah pertambangan pertama di Hindia Belanda yang dikelola oleh perusahaan pertambangan milik Pemerintah Hindia Belanda maupun perusahaan milik swasta, salah satunya adalah wilayah Bengkulu.<sup>10</sup>

Eksplorasi pertambangan yang dilakukan di Bengkulu tahun 1895-1896 berada di *onderafdeeling* Lebong dan menemukan endapan primer di Lebong Donok. Selanjutnya, temuan tersebut mulai ditambang oleh *Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong* sejak tahun 1897.<sup>11</sup>

*Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong* merupakan perusahaan pertambangan tertua di Lebong yang resmi berdiri pada tanggal 10 Februari 1897. Berikutnya, beberapa endapan emas hasil penelitian lanjutan ditemukan di Lebong Sulit, Lebong Simau, Lebong Simpang, dan Tambang Sawah.<sup>12</sup>

Awal abad ke-20, Lebong berhasil menjadi wilayah pertambangan yang produktif di Hindia Belanda. Adapun total pendapatan emas di Lebong tahun 1913 sejumlah 4,5 juta gulden.<sup>13</sup> Hasil pertambangan Kolonial Belanda di Lebong terus mengalami kemajuan hingga tahun 1916.<sup>14</sup> Pertambangan emas tersebut mampu menghasilkan dua per tiga dari seluruh hasil emas Hindia Belanda pada tahun 1922.<sup>15</sup> Kondisi ini ikut mempengaruhi jumlah produksi emas Hindia Belanda di tahun 1930 yang mencapai angka tertinggi jika dibandingkan dengan produksi emas tahun 1900, 1910, 1920, dan 1940, yaitu sebesar 2.901 kilogram emas.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> S. de Graaf dan D.G. Stibbe., *op.,cit.*, hlm. 540.

<sup>13</sup> J. Paulus., *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie-Tweede Druk*, (Leiden : 'S-Gravenhage, 1917), hlm. 270.

<sup>14</sup> Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Bidang Sejarah dan Antropologi., *Bengkulu Dipandang dari Sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1972), hlm. 94.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>16</sup> Djoko Darmono., *op.,cit.*, hlm. 81.

<sup>9</sup> Djoko Darmono., *op.,cit.*, hlm. 66.

<sup>10</sup> Inventaris Arsip Dienst van Mijnwezen 1899-1959., *op.,cit.*, hlm. 4. Lihat juga, S. de Graaf dan D.G. Stibbe (ed)., *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie -Tweede Druk*, (Leiden : 'S-Gravenhage, 1918).

<sup>11</sup> Djoko Darmono., *op.,cit.*, hlm. 79.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas di Lebong pada awal abad ke-20 memunculkan permasalahan yang menarik untuk diteliti. Hal ini sehubungan dengan keberadaan perusahaan pertambangan emas Kolonial Belanda yang membawa perubahan bagi wilayah Lebong, sehingga tulisan ini lebih rinci menjelaskan bagaimana perkembangan sistem pemerintahan, tata kota, dan kondisi sosial masyarakat Lebong pasca pendirian perusahaan pertambangan emas Kolonial Belanda tahun 1897-1930. Mengingat pada awal abad ke-20, perusahaan pertambangan memberikan keuntungan karena Pemerintah Hindia Belanda maupun pihak perusahaan swasta telah mengambil alih seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan.

### Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode sejarah dalam penelitian. Menurut *Louis Gottschalk*, metode sejarah merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menguji, dan menganalisa masa lalu kemudian merekonstruksi berdasarkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan historiografi.<sup>17</sup> Ada empat tahapan metode sejarah, diantaranya :

Heuristik, yaitu proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumen yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berupa arsip *Dienst van Mijnwezen*. Beberapa arsip tersebut diantaranya *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 779 Tahun 1920, *Verslag Van Het Mijnwezen In Nederlandsch Indie Over Het Jaar 1910* dalam *Jaarboek Van Het Mijnwezen, Gouvernement Besluit* Tanggal 31 Desember 1873 No. 33, *Telegraaf en Telefoon dienst in Nederlandsch Indie* Tanggal 8 November 1918 dan 9 Januari 1919, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie Tweede Druk* Tahun 1917 dan Tahun 1918.

Langkah kedua dari metode penelitian sejarah ialah melakukan kritik terhadap sumber data yang telah ada. Kritik tersebut dilakukan secara intern dan ekstern. Setelah dikritik, kemudian proses selanjutnya ialah interpretasi. Proses ini dilakukan untuk menafsirkan sumber-sumber sejarah.

Terakhir, dilakukanlah proses historiografi, yaitu kegiatan menyampaikan pemahaman fakta sejarah dalam bentuk kisah. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih menarik, logis, objektif, dan dapat dipercaya dengan tidak meninggalkan ciri-

---

<sup>17</sup> Louis Gottschalk., *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : Indonesia University, 1975), hlm. 20.

ciri ilmiah.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data historis yang dilakukan dengan menyusun kisah dan menginterpretasikan fakta-fakta sejarah menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi industri.

## **Pembahasan**

Lebong merupakan wilayah yang termasuk dalam Karesidenan Bengkulu. Wilayah Lebong memiliki struktur geografis memanjang dengan dataran subur terbentang dari Gunung Seblat hingga daerah aliran Sungai Ketahun dan Sungai Musi. Selain itu, terdapat beberapa barisan pegunungan yang berbatasan langsung dengan Lebong, diantaranya Gunung Rantai, Hulu Seblat (2.383 M), Bukit Runcing (2.221 M), Gunung berapi Kembar Belirang-Lumut, Bukit Bubung, Bukit Panjang, serta Bukit Tiga. Kondisi tersebut menyebabkan Lebong dikelilingi oleh aliran andesit, lava, tufa, serta memiliki dataran aluvial sepanjang 13 Km dengan lebar 6 Km.<sup>19</sup> Hal ini menjadikan Lebong sebagai wilayah yang menyimpan lapisan tanah yang mengandung logam mulia berupa emas.

Usaha penambangan emas Pemerintah Hindia Belanda diawali dengan

kegiatan eksplorasi pertama yang dilakukan oleh *Eugene Kassel* di Lebong pada tahun 1896. Eksplorasi ini mendapat dukungan dari salah seorang tokoh masyarakat setempat, yaitu berupa petunjuk dan arahan dari *Haji Ismael*. Hasil dari kegiatan tersebut menemukan titik lapisan yang produktif dan kaya akan endapan bijih emas dengan kadar tinggi.<sup>20</sup> Endapan bijih emas primer di daerah Lebong Donok itu kemudian ditambang oleh perusahaan swasta Belanda bernama *Mijnbouw Maatschappij Lebong* mulai tahun 1897.<sup>21</sup>

Kegiatan eksplorasi selanjutnya menemukan endapan emas di Lebong Sulit, Lebong Simau, Lebong Simpang dan Tambang Sawah. Hasil eksplorasi tersebut kemudian diambil alih oleh dua perusahaan swasta Belanda, yaitu *Mijnbouw Maatschappij Lebong Sulit* di Ketahun pada tahun 1902 dan perusahaan *Mijnbouw Maatschappij Simau* di Lebong Simau pada tahun 1906, sedangkan endapan emas di Lebong Simpang dan Tambang Sawah ditindaklanjuti oleh perusahaan milik Pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda memperoleh kemudahan mendirikan industri pertambangan di Lebong tanpa adanya perlawanan yang berarti dari

---

<sup>18</sup> Nugroho Notosusanto., *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1987), hlm. 18.

<sup>19</sup> S. de Graaf dan D.G. Stibbe (ed)., *op., cit.*, hlm. 539.

---

<sup>20</sup> J. Paulus., *op., cit.*, hlm. 269-270.

<sup>21</sup> Djoko Darmono (ed)., *op., cit.*, hlm. 79.

penduduk setempat. Hal ini dikarenakan telah adanya berbagai kesepakatan yang diadakan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintahan lokal *Depati Tiang Empat*. Kesepakatan tersebut diadakan untuk mengambil simpati dari masyarakat setempat sekaligus meredam perlawanan yang pernah terjadi sebelumnya. Kesepakatan tersebut berupa perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan *Depati Tiang Empat* yang telah dilakukan selama tiga periode, yaitu tahun 1841, 1856, dan 1859.

Di Lebong, perkembangan sistem pemerintahan dalam hal pelaksanaan Hukum Adat dan peraturan-peraturan Marga banyak dibatasi, dan ditentukan oleh peraturan Pemerintah Hindia Belanda. Kontrol tersebut berupa penjabaran, penggantian, dan penghapusan peraturan Marga yang ditetapkan Dewan Marga.<sup>22</sup> Hal ini terlihat dari kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang membagi wilayah *Depati Tiang Empat* ke dalam marga-marga yang merupakan pemerintahan otonom langsung kepada pejabat Belanda. Marga dipecah lagi menjadi dusun-dusun yang

sifatnya otonom pula, namun tetap di bawah pemerintahan marga. Dewan Marga yang diketuai oleh Kepala Marga dibentuk untuk membuat peraturan tentang marga. Dengan demikian masyarakat Hukum Adat *Tiang Empat*, secara perlahan menjadi Hukum Adat Rejang ala Marga yang bersangkutan. Awalnya, pembentukan Marga berdasarkan *Petulai* atau pecahan *Petulai*, tetapi kemudian Marga itu dipecah lagi bahkan ada pula *Petulai* lain yang disatukan. Di dusun-dusun yang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan yang dihuni oleh para pendatang, wewenang Hukum Adat dikaburkan. Dusun-dusun dijadikan sebagai wilayah teritorial yang memiliki pemerintahan otonomi setingkat Marga yang disebut Pasar, seperti Pasar Curup, Pasar Muara Aman, Pasar Taba Penanjung, Pasar Kepahyang, dan Pasar Lais. Akibatnya, pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah dalam masyarakat setempat ikut mengalami perubahan. Bersamaan dengan terjadinya perubahan tersebut, hak wewenang Kepala Marga dan Kepala Dusun serta hal-hal yang dipandang tidak cocok dengan pandangan Pemerintah Hindia Belanda, secara bertahap dihapuskan dan diganti.<sup>23</sup> Perubahan kebijakan secara struktural yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda semata-mata hanya untuk mendapatkan

---

<sup>22</sup> Harry Waluyo (ed.), *Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Daerah Bengkulu*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1990 ), hlm. 98.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

simpati dari tokoh pribumi sekaligus dapat mempermudah kontrol terhadap wilayah kekuasaan di Lebong melalui penempatan pejabat pribumi dalam pemerintahan. Mengingat agar apa yang diinginkan Pemerintah Hindia Belanda dapat tercapai tanpa adanya penolakan berupa perlawanan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum kedatangan Belanda ke wilayah Lebong, penguasaan tanah masyarakat setempat bersifat kolektif. *Depati Tiang Empat* tidak pernah memiliki hutan, tanah, dan air dalam wilayah masing-masing. Mereka hanyalah pemegang hak-hak bersama dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk kehidupan bersama. Hutan, tanah, danau, sungai, rawa, beserta segala isinya dalam wilayah suku bangsa Rejang merupakan milik dari kuteui atau dusun masing-masing. Tanah sebagai faktor produksi, yang terpenting adalah kepemilikan bersama masyarakat desa dan raja. Kedudukan raja hanyalah sebagai pemegang hak-hak persekutuan atas tanah bukan pemiliknya. Ia bertindak sebagai pengurus, pengatur, dan pengawas agar pemakaian tanah di wilayahnya tidak bertentangan serta merugikan hak-hak persekutuan dan hak-hak perseorangan atas tanah. Penerapan pola kepemilikan inilah yang mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan politik pertanahan di wilayah

Lebong, dimana menyediakan tanah-tanah yang diperlukan oleh industri-industri swasta Belanda.<sup>24</sup>

Beberapa industri pertambangan emas dibangun di Lebong dan pembuatan jalan dari Bengkulu ke Lebong telah selesai, Bengkulu pun menjadi sebuah Karesidenan. Barulah Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Bengkulu pada tahun 1904.<sup>25</sup> Berdirinya tiga perusahaan pertambangan emas swasta Belanda dan dua perusahaan pertambangan emas milik Pemerintah Hindia Belanda menggambarkan bahwa pada masa ini, tanah di Lebong sudah mulai dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini terkait dengan pembuatan jalan raya dari Bengkulu ke Muara Aman sepanjang 160 km yang telah dimulai pembangunannya sejak tahun 1868.<sup>26</sup> Salah satu dampak dari pembangunan perusahaan pertambangan emas ialah pembuatan jalan aspal. Pembuatan jalan aspal tersebut memiliki peran besar bagi mobilitas di berbagai daerah seperti pendirian kantor-kantor perdagangan, beserta perangkat pendukung

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 39. Hak kepemilikan tanah hanya berlaku bagi penduduk asli

dari marga bersangkutan. Sedangkan bagi pendatang baik dari marga, suku, dan bangsa lain hanya mendapatkan hak pakai atau hak sewa. *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

lainnya yaitu pabrik, kantor administrasi, dan tempat tinggal.

Pembangunan jalan semakin pesat karena adanya kebijakan desentralisasi, sehingga pembangunan prasarana diserahkan kepada pemerintah daerah. Di daerah lain di luar Pulau Jawa, program pembangunan belum sepenuhnya dilakukan, terkecuali sebagian Pulau Sumatera dimana telah dibangun jalan dari Padang lewat Lembah Anai ke Fort de Kock, dan jaringannya mencapai Medan, Bengkulu, Tebing Tinggi, Telukbetung, dan Kotaraja.<sup>27</sup>

Di Bengkulu, pembangunan jalan lebih difokuskan bagi daerah Lebong yang merupakan wilayah pertambangan. Hal ini dilakukan untuk pembangunan sebuah dusun tambang yang mulai dirintis sejak perusahaan Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong mendapatkan hak konsesi pertambangan emas di Lebong Donok pada tahun 1899. Sebuah kota kecil tambang yang lengkap dengan kantor administrasi, mesin-mesin pabrik tambang, perumahan megah yang diperuntukan bagi para pegawai Belanda, tempat berpesta bagi para pegawai Belanda, rumah pemondokan untuk para pegawai pribumi terdiri dari orang-orang dari Pulau Jawa yang dikenal

dengan sebutan kuli kontrak, balai bersukaria bagi pribumi dengan musik tradisional gamelan dan para ronggengnya, sebuah rumah sakit dengan para dokter dan staf, toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, gedung bioskop, kantor pos atau telegraf, dan sebuah gedung sekolah ELS. Semua bangunan di kota kecil ini terbuat dari bahan kayu dan dilengkapi pula dengan penerangan listrik serta keperluan air bersih. Pengadaan fasilitas-fasilitas di Lebong tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan perusahaan pertambangan pertambangan emas Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong di Lebong donok yang dibuka pada tahun 1899 (Keputusan PHB 28 Januari 1899), di Ketahun oleh perusahaan Mijnbouw Maatschappij Lebong Sulit pada tahun 1902 (Keputusan PHB 3 Februari 1902), dan di Lebong Tandai oleh perusahaan Mijnbouw Maatschappij Simau pada tahun 1906 (Keputusan PHB 15 Juni 1906). Hasilnya, pada tahun 1901 dan tahun 1903, Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong memproduksi emas masing-masing sejumlah 1.196.475 gulden dan 1.984.500 gulden, sedangkan Maskapai Ketahun menghasilkan 6.000.835 gulden pada tahun 1908.<sup>28</sup>

Pada tahun 1907 dan 1910, kantor pos dan telegram telah dibuka masing-

<sup>27</sup> Dr. Agus Sachari., *Budaya Visual Indonesia*, (Erlangga : Jakarta, 2007), hlm. 64.

<sup>28</sup> Abdullah Siddik., *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 110.



masing di wilayah Kepahyang dan Lebong Donok, sedangkan untuk pembangunan jaringan telepon di Lebong Simpang dimulai sejak tahun 1919.<sup>29</sup> Kemudian, untuk memperlancarkan perhubungan darat, Pemerintah Hindia Belanda melakukan proyek pengadaan bus-bus milik pemerintah maupun perusahaan swasta pada tahun 1912. Hal ini didukung pula oleh keberadaan jalan raya yang terpelihara dengan baik.<sup>30</sup> Pada tahun 1912 sudah terdapat dinas kendaraan bermotor di Bengkulu, sebagai sarana yang menghubungkan kota pangkalan kapal di sungai-sungai dan stasiun kereta api. Dinas angkutan bermotor tersebut berfungsi untuk mengangkut pos dan penumpang.<sup>31</sup>

Kemajuan prasarana di Lebong dapat dilihat dari kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Secara fungsional, keberhasilan dari perkembangan tata ruang yang terdapat di Lebong tersebut sebagian besar hanya dapat dinikmati oleh orang-

orang Belanda saja tanpa memberikan manfaat lebih bagi perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pribumi setempat. Fenomena ini merupakan gambaran bagaimana wujud sebuah sistem kapitalisme yang dialami oleh daerah jajahan.

Di sisi lain, perkembangan secara signifikan yang terjadi di wilayah Lebong memberikan penjelasan lain tentang proses peralihan desa tambang menjadi sebuah kota baru di wilayah Karesidenan Bengkulu. Ramainya kegiatan penambangan menjadikan Lebong bukan hanya sebagai wilayah yang aktif memproduksi bahan galian logam mulia, melainkan juga mendorong lahir pusat pemerintahan dan perekonomian baru. Kondisi ini menggambarkan hadirnya sebuah transformasi budaya yang dibawa orang-orang Belanda, baik dari bidang pemerintahan, ekonomi, maupun sosial.

Perubahan berarti lainnya pasca pendirian perusahaan pertambangan emas Kolonial Belanda di wilayah Lebong dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Pada tahun 1930, penduduk daerah Bengkulu berjumlah 292.551 jiwa yang terdiri dari 151.342 penduduk laki-laki dan 141.209 penduduk wanita. Di samping itu, dalam jumlah yang tidak banyak terdapat pendatang-pendatang yang berasal dari

<sup>29</sup> Arsip Mijnwezen, berupa *Telegraaf en Telefoon dienst in Nederlandsch Indie* Tanggal 8 November 1918 dan 9 Januari 1919.

<sup>30</sup> Abdullah Siddik., *op., cit.*, hlm. 115.

<sup>31</sup> Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Bidang Sejarah dan Antropologi., *Bengkulu Dipandang dari Sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan, op., cit.*, hlm. 96-97. Pembahasan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda mengenai pribumi yang dipekerjakan sebagai kuli untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara jalan beserta peraturan kerja dapat melihat *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 779 Tahun 1920.

Padang, Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Ambon, Palembang, serta orang-orang Cina. Sebagian dari mereka datang untuk kepentingan berdagang.<sup>32</sup> Komposisi jumlah penduduk heterogen di Lebong tersebut dipengaruhi pula dengan banyaknya jumlah kolonisasi yang datang dari Pulau Jawa. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai kuli kontrak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Perusahaan Pertambangan Emas di Lebong pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

### **Kesimpulan**

Peralihan kekuasaan dari Kolonial Inggris kepada Pemerintah Hindia Belanda di Bengkulu pada tahun 1825 memunculkan kembali perlawanan dari masyarakat pribumi terhadap bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan kebijakan secara administratif maupun struktural. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat setempat, khususnya tokoh pribumi. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kedudukan kepada tokoh pribumi dalam pemerintahan dalam rangka mempermudah Pemerintah Hindia Belanda melakukan kontrol terhadap wilayah kekuasaan di Lebong.

Melalui berbagai kesepakatan, Pemerintah Hindia Belanda kemudian memperoleh kemudahan mendirikan industri pertambangan di Lebong tanpa adanya perlawanan yang berarti dari penduduk setempat. Pendirian tiga perusahaan pertambangan emas swasta Belanda dan dua perusahaan pertambangan emas milik Pemerintah Hindia Belanda memberikan dampak yang besar bagi wilayah Lebong.

Salah satu dampak dari pendirian tersebut ialah pembuatan jalan aspal. Pembuatan jalan aspal tersebut memiliki peran besar bagi mobilitas di berbagai daerah. Lebong menjadi kota kecil tambang yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pertambangan *Mijnbouw Maatschappij Rejang Lebong*, *Mijnbouw Maatschappij Lebong Sulit*, *Mijnbouw Maatschappij Simau*, Perusahaan Pertambangan Emas Lebong Simpang dan Perusahaan Pertambangan Emas Tambang Sawah. Fasilitas tersebut diantaranya kantor administrasi, perumahan pegawai Belanda, tempat berpesta bagi para pegawai Belanda, rumah pemondokan untuk para kuli kontrak, rumah sakit, gedung bioskop, kantor pos atau telegraf, dan sekolah. Namun sebagian besar fasilitas tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang Belanda. Di sisi lain, adanya komposisi jumlah penduduk yang heterogen sejak didirikannya

<sup>32</sup> Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional., *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), hlm. 52.

perusahaan pertambangan, didukung pula dengan ramainya aktivitas pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Lebong memunculkan indikator bahwa, di saat yang bersamaan Lebong mengalami proses peralihan desa tambang menjadi sebuah kota baru di wilayah Karesidenan Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip

*Bijblad van Nerderlandsch-Indie*. No. 7667. 1912. Batavia : Landsdrukkerij.

*Binnelandsch Bestuur*. Aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur. No. 626. Bogor 21 Februari 1903.

*Binnelandsch Bestuur*. Aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur. Tanggal 20 Januari 1939.

De Graaf, S., dan D.G. Stibbe (ed). 1918. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie Tweede Druk*. Leiden : 'S Gravenhage.

Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip. 2011. *Inventaris Arsip Dienst van Mijnwezen 1899-1959*. Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia.

\_\_\_\_\_. *Guide Arsip Kekayaan Negara Bidang Pertambangan Masa Hindia Belanda*. Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia.

*Gouvernement Besluit* Tanggal 31 Desember 1873 No. 33.

Mijnwezen. *Aan Chef van het Mijnwezen Te Weltevreden*, Muara Aman 2 April 1909.

\_\_\_\_\_. 21 April 1909.

\_\_\_\_\_. 1 Maret 1911.

\_\_\_\_\_. *Grondwerkplan voor de Gouvernements Goud en Zilvermijnen 1923*.

\_\_\_\_\_. *Grondwerkplan Tambang Sawah en Lebong Simpang 1923 en 1924*.

\_\_\_\_\_. *Telegraaf en Telefoon dienst in Nederlandsch Indie* Tanggal 8 November 1918 dan 9 Januari 1919.

Paulus, J. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie -Tweede Druk*. Leiden : 'S Gravenhage.

Proyek Inventaris dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Bidang Sejarah dan Antropologi. 1972. *Bengkulu Dipandang dari Sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 1982/1983. *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Bengkulu*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie*. Tweede Gedeelte halaman 254-255. 1926. Batavia : Landsdrukkerij.
- Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie*. Eerste Gedeelte halaman 159. 1938. Batavia : Landsdrukkerij.
- Staatsblad van Nerderlandsch-Indie*. No. 461. 1924. Batavia : Landsdrukkerij.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 280 Tanggal 31 Desember 1873.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 341 Tahun 1930.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* No. 779 Tahun 1920.
- Staatsblad van Nerderlandsch-Indie*. Over het Jaar No. 115. 1892. Batavia : Landsdrukkerij.
- Staatsblad van Nerderlandsch-Indie*. Over het Jaar No. 48. 1891. Batavia : Landsdrukkerij.
- Stibbe, D.G., dan Mr. Sandbergen (ed). 1935. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie Tweede Druk*. Leiden : 'S Gravenhage.
- Verslag Van Het Mijnwezen In Nederlandsch Indie Over Het Jaar 1910* dalam *Jaarboek Van Het Mijnwezen*.
- Verslagen en Mededeelingen Betreffende Indische delfstoffen en Haren Toepassingen* No. 4 Tahun 1918.
- B. Buku**
- Abdillah, Aam. 2012. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi : Arah dan Perspektif*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Darmono, Djoko (ed). 2009. *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa : Sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia*. Jakarta : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Indonesia University.
- Hardjono, Joan (ed). 1982. *Transmigrasi : Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Kesuma, Indra Djaja, dkk. 2008. *Benteng Marlborough 1714 : Kilas Balik Sejarah Asal Nama Bengkulu*. Tanpa kota dan nama penerbit.
- Manning, Patrick. 2005. *Migration in World History*. New York and London : Routledge Taylor and Francis Group.
- Marsden, William. 2013. *Sejarah Sumatera*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Notosusanto, Nugroho. 1987. *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- Ranni, M. Z. 1990. *Perlawanan terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bengkulu*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Reid, Anthony. 2011. *Menuju Sejarah Sumatera*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ricklefs, M. C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern* (edisi terjemahan oleh tim penerjemah serambi). Jakarta : Serambi.

Sachari, Agus. 2007. *Budaya Visual Indonesia*. Erlangga : Jakarta.

Setiyanto, Agus. 2006. *Orang-orang Besar Bengkulu : Riwayatmu Dulu*. Yogyakarta : Ombak.

Siddiq, Abdullah. 1996. *Sejarah Bengkulu 1500-1900*. Jakarta : Balai Pustaka.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.

Sukandarrumidi. 1999. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.

Utomo, Muhajir dan Rofiq Ahmad (ed). 1997. *90 Tahun Kolonisasi 45 Tahun Transmigrasi : Redistribusi Penduduk di Indonesia*. Jakarta : Puspa Swara.

Wahyudi, Tatang. 1995. *Bahan Galian Logam Emas*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral.

Waluyo, Harry (ed). 1990. *Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Daerah Bengkulu*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.

Winarno, Bondan. 1997. *Bre-X : Sebungkah Emas di Kaki Pelangi*. Jakarta : Inspirasi Indonesia.

### C. Jurnal Ilmiah

Lindayati, "Menuju Tanah Harapan : Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu" dalam *Humaniora*. 3 Oktober 2006. Halaman 298.

### D. Skripsi

Heles Yarmaini. 2009. "Perkembangan Perdagangan Etnis Cina di Bengkulu Pada Akhir Abad XVIII sampai awal abad XIX". *Skripsi* Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ratna Dewi Kartikasari. 2002. "Pertambangan Timah di Pulau Bangka Tahun 1812-1891". *Skripsi* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta.